Al Iidara Balad
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

IMPLEMENTASI PROGAM TRIBINA DI DESA PAMINTANGAN KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Ahmad Shaufi[1], Jumaidi[2], Djayeng Turano Gunade[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: ufi.fishau@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh: Pertama, Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada program Tribina di Desa Pamintangan. Kedua, Keterbatasan sumber daya manusia. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan Program Tribina di Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penentuan secara purposive sampling berjumlah 11 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program Tribina di Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dinilai kurang optimal diukur melalui model Donald P. Warwick yaitu : Pertama Sub-Variabel Kemampuan Organisasi indikator Kemampuan Teknis masih kurang optimal, Kemampuan Menjalin Hubungan masih kurang optimal, SOP yang sudah jelas. Kedua Sub-Variabel Informasi indikator Ketersediaan Data masih kurang optimal, Penyampaian Informasi sudah optimal. Ketiga Sub-Variabel Dukungan indikator Dukungan Birokrat sudah mendapat dukungan penuh dari pihak desa, Dukungan Masyarakat yang masih kurang optimal. Keempat Sub-Variabel Pembagian Potensi dengan indikator Distribusi Kekuasaan masih kurang optimal, Alokasi Sumber Daya yang sudah optimal. Adapun faktor pendukung dalam implementasi Program Tribina di Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara diantaranya Pertama Ketersediaan Anggaran, Kedua Adanya Sarana dan Prasarana yang memadai, dan Ketiga Dukungan penuh oleh Pemerintah Desa Pamintangan terhadap pelaksanaan Program Tribina. Sedangkan faktor penghambatnya adalah Pertama Rendahnya Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Pembinaan Keluarga, Kedua Kualitas Sumber Daya Manusia yang Relatif Kurang Memadai, Ketiga Kurangnya Pelatihan Kemampuan bagi Setiap Kader, Keempat Data belum diperbarui (updating data lemah). Saran dalam penelitian, untuk Kepala Desa Pamintangan agar melakukan pembaruan data dan selalu di perbarui secara berkala sekali setahun agar dapat membantu dalam perencanaan dan evaluasi program Tribina. Kepada Penyuluh KB Amuntai Utara untuk dapat mendorong peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan dan pembinaan kader secara langsung. Dan untuk kader Tribina agar memperkuat koordinasi dan kerja sama antar kelompok.

Kata Kunci: Implementasi, Program, Tribina

ABSTRACT

This research is based on: First, the low level of community participation in the Tribina program in Pamintangan Village. Second, limited human resources. The purpose of the research is to find out the implementation of the Tribina Program in Pamintangan Village, North Amuntai District, North Hulu Sungai Regency and to find out what factors influence its implementation. This study uses a qualitative approach with a qualitative descriptive type. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The data source was taken through purposive sampling determination of 11 people. After the data is collected, it is analyzed by data reduction techniques, data presentation, conclusion drawn, and verification. The results of this study show that the implementation of the Tribina program in Pamintangan Village, North Amuntai District, North Hulu Sungai Regency is considered less than optimal as measured through the Donald P. Warwick model, namely: First, the Sub-Variable of Organizational Ability, the indicator of Technical Ability, the ability to establish relationships is still less than optimal, and the SOP is clear. Second,

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

the Information Sub-Variable indicator of Data Availability is still not optimal, Information Delivery is optimal. The three Sub-Variables of Support indicators Bureaucratic Support has received full support from the village, Community Support which is still not optimal. The four Sub-Variables of Potential Distribution with the Power Distribution indicator are still not optimal, the Resource Allocation is already optimal. The supporting factors in the implementation of the Tribina Program in Pamintangan Village, North Amuntai District, North Hulu Sungai Regency include the First Availability of the Budget, the Second the Existence of Adequate Facilities and Infrastructure, and the Third Full Support by the Pamintangan Village Government for the implementation of the Tribina Program. While the inhibiting factors are First, low public awareness of the importance of family development, Second, the relatively inadequate quality of human resources, Third, lack of skills training for each cadres, Fourth, data that has not been updated (weak data update). The suggestion in the research is for the Head of Pamintangan Village to update the data and always update it periodically once a year in order to help in the planning and evaluation of the Tribina program. To the North Amuntai KB Extension Workers to be able to encourage cadre capacity building through direct cadre training and coaching. And for Tribina cadres to strengthen coordination and cooperation between groups..

Keyword: *Implementation, Program, Tribina.*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan proses yang berkelanjutan dan terencana, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam kerangka pembangunan tersebut, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu strategi utama yang diusung oleh pemerintah Indonesia. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan paradigma pembangunan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam setiap proses pembangunan, bukan sekadar objek dari kebijakan pemerintah. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.

Secara umum, pemberdayaan masyarakat di Indonesia telah menjadi agenda prioritas dalam berbagai kebijakan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Oleh karena itu, berbagai program pemberdayaan masyarakat telah dirancang dan diimplementasikan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, serta kesejahteraan masyarakat. Salah satu program yang menonjol dalam konteks ini adalah Program Tribina, yang terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Program Tribina merupakan inovasi pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan berbasis keluarga, yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan.

Kondisi ideal yang diharapkan dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Tribina adalah terciptanya masyarakat yang mandiri, sehat, berpendidikan, dan memiliki daya saing tinggi. Program Bina Keluarga Balita (BKB) misalnya, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak usia dini, sehingga dapat mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Sementara itu, Bina Keluarga Remaja (BKR) difokuskan pada pembinaan remaja agar mampu menghadapi tantangan masa depan dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang kuat. Adapun Bina Keluarga Lansia (BKL) diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia melalui berbagai kegiatan yang mendukung kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka. Dengan demikian, Program Tribina diharapkan mampu menciptakan

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

siklus kehidupan keluarga yang sehat, produktif, dan harmonis, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan nasional secara keseluruhan.

Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan Implementasi Program Tribina masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan di lapangan. Berdasarkan pengamatan awal penulis di Desa Pamintangan Kecamatan Amuntau Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, ditemukan beberapa fenomena masalah yaitu:

1. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program tersebut. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami manfaat dan tujuan dari Program Tribina, sehingga kurang aktif terlibat dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan, masyarakat lebih memilih fokus pada pencarian nafkah daripada kegiatan yang dianggap kurang mendesak tanpa insentif langsung seperti bantuan pangan, pelatihan praktis, atau uang transport sehingga membuat minimnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan Tribina di Desa Pamintangan. Selain itu, sebagian besar masyarakat desa Pamintangan juga merupakan pekerja kantoran dimana hal ini menjadi salah satu alasan kenapa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Tribina di Desa Pamintangan.
2. Keterbatasan sumber daya manusia. Hal ini juga menjadi hambatan utama dalam pengimplementasian progam Tribina, di mana kurangnya tenaga ahli atau fasilitator yang menjangkau di tingkat desa membuat sosialisasi dan pelatihan bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR), dam bina keluarga lansia (BKL) sering kali dilakukan oleh kader yang tidak kompeten, sehingga materi yang disajikan kurang efektif dan menarik. Selain itu, ada juga kader yang hanya tertera di SK namun tidak ikut serta dalam pelaksanakan kegiatan Tribina setiap bulannya di kantor Desa Pamintangan, sehingga beban tanggungjawab kader tersebut dilimpahkan kepada kader lain yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan Tribina di Desa Pamintangan.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah dari Diana Safitri, Jumaidi, dan Gusti Muhammad Hidayatullah (2025) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Publik Amuntai dalam penelitian yang berjudul "Implementasi Progam Tribina, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) di Desa Pandangian Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan". Dan Munawarah (2023) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai dalam penelitian yang berjudul "Partisipasi Masyarakat dala Progam Tribina (Bina Keluiarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia) di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi kasus Desa Darussalam, Desa Palukahan dan Desa Pandamaan)". Penelitian ini menemukan bahwa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat di antaranya Tingkat Ekonomi, Kemampuan untuk berpartisipasi, dan Kurangnya Dukungan Atau Kemauan Dari Diri Sendiri.

.

METODE

Penelitian ini menggunakan model pendekatan deskriptif-kualitatif, dengan teori implementasi memakai model dari Donald P. Warwick yang menjelaskan bahwa kinerja suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 faktor diantaranya: Kemampuan Organisasi; Informasi; Adanya Dukungan; dan Pembagian Potensi. Dengan menggunakan *purposive sampling*, peneliti memilih 11 informan untuk dijadikan sebagai sumber data peneliti.Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi (Hardini, 2020). Teknik analisis data menggunakan model Miles & Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan verefikasi data

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

(Sugiyono, 2025). Uji Kredibilitas penelitian diperiksa dengan menggunakan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif. Menggunakan bahan referensi, mengadakan *member check* (Sugiyono, 2025).

PEMBAHASAN

A. Implementasi Progam Tribina di Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara

Implementasi secara sederhananya dapat dipahami sebagai proses pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah. Tingkat keberhasilan implementasi dapat diukur menggunakan teori-teori yang telah dicetuskan oleh para ahlinya. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

1. Kemampuan Organisasi
   a. Kemampuan Teknis Pelaksana dalam Menjalankan Progam

      Kemampuan teknis pelaksana adalah jembatan antara niat kebijakan yang tertulis di atas kertas dengan realitas yang terjadi di lapangan.

      Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai kemampuan kader Program Tribina di Desa Pamintangan, dapat disimpulkan bahwa para kader kurang optimal dalam menjalankan tugas dan perannya dalam pelaksanaan kegiatan Tribina. Hal tersebut diakinatkan oleh minimnya kemampuan kader dan belum adanya pelatihan berbasis pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan kader, sehingga kader menjadi sedikit kesulitan dalam melaksanakan progam.

   b. Kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain.

      Kemampuan menjalin hubungan dengan organisasi lain adalah kapasitas para pelaksana program untuk membangun, memelihara, dan mengoptimalkan relasi kerja sama dengan berbagai pihak eksternal yang memiliki kepentingan, sumber daya, atau kewenangan yang berkaitan dengan program tersebut.

      Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pelaksana Program Tribina di Desa Pamintangan dalam menjalin hubungan dengan organisasi atau instansi lain masih kurang optimal. Pada kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL), belum terdapat keterlibatan instansi lain maupun bentuk kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaannya.

   c. Kejelasan mengenai standar operasional prosedur (SOP)

      Kejelasan mengenai SOP dalam kerangka Warwick adalah tersedianya pedoman kerja yang terstandar, terperinci, dan dapat dipahami secara merata oleh seluruh pelaksana program di semua tingkatan. SOP dalam konteks ini bukan sekadar dokumen administratif yang tersimpan di laci meja birokrasi, melainkan merupakan instrumen operasional yang benar-benar hidup, diketahui, dipahami, dan dijalankan oleh setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan program.

      Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa kejelasan SOP dalam pelaksanaan program Tribina di Desa Pamintangan sudah Optimal dan mampu menjadi pedoman bagi para kader dalam menjalankan kegiatan. Hal tersebut terlihat dari para kader, pengurus, maupun pihak terkait menilai adanya SOP tertulis sangat membantu dalam memahami prosedur pelaksanaan kegiatan, pembagian tugas, administrasi, pengarsipan, hingga penyusunan SPJ setelah kegiatan dilaksanakan

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

2. Informasi
   a. Akses terhadap ketersediaan data

      Akses terhadap ketersediaan data dalam kerangka Warwick adalah kondisi di mana para pelaksana program memiliki kemampuan nyata untuk memperoleh, menggunakan, dan memanfaatkan informasi yang relevan, akurat, mutakhir, dan lengkap dalam setiap tahapan pelaksanaan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, hingga evaluasi.

      Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai akses terhadap ketersediaan data dukung dalam pelaksanaan kegiatan Tribina di Desa Pamintangan, dapat disimpulkan bahwa kurang optimal, data dukung dalam kegiatan Tribina pada dasarnya sudah tersedia dan digunakan sebagai penunjang pelaksanaan program.

   b. Penyampaian Informasi yang jelas terkait progam

      Penyampaian informasi yang jelas terkait program dalam kerangka Warwick adalah proses komunikasi yang terencana, sistematis, dan efektif yang memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam sebuah program, baik pelaksana di berbagai tingkatan maupun kelompok sasaran yang menjadi penerima manfaat, memiliki pemahaman yang benar, lengkap, dan tidak menyimpang tentang tujuan program, mekanisme pelaksanaannya, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta manfaat yang dapat diperoleh dari keikutsertaan dalam program tersebut.

      Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa penyampaian informasi terkait pelaksanaan Program Tribina di Desa Pamintangan sudah berjalan optimal dan terstruktur. Hal ini terlihat dari informasi kegiatan disampaikan secara rutin setiap bulan melalui berbagai cara, seperti surat undangan, penyampaian langsung ke rumah warga, serta melalui grup WhatsApp. Hal ini menunjukkan adanya upaya konsisten dari pelaksana program dalam memastikan masyarakat mengetahui jadwal kegiatan Tribina.

3. Dukungan
   a. Dukungan Birokrat

      Dukungan birokrat merupakan salah satu indikator dari sub variabel dukungan dalam teori implementasi kebijakan Donald P. Warwick, yang menggambarkan sejauh mana aparat atau pejabat birokrasi turut memberikan komitmen, keterlibatan, dan dukungan nyata terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Dukungan ini dapat ditunjukkan melalui kesediaan para petugas pelaksana di lapangan maupun pimpinan instansi terkait untuk mengoordinasikan dan memfasilitasi jalannya program, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan seperti anggaran, sarana, dan waktu, terlibat secara langsung dalam mendampingi serta mengawasi pelaksanaan kegiatan, dan bersikap responsif terhadap berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaksana di lapangan

      Desa Pamintangan, pelaksanaan kegiatan Tribina (BKB, BKR, dan BKL) secara umum telah berjalan cukup baik dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Aparat desa dinilai telah memberikan dukungan dalam bentuk fasilitasi tempat, koordinasi, serta arahan dalam pelaksanaan kegiatan.

   b. Dukungan Masyarakat

      Implementasi kebijakan Donald P. Warwick pada dasarnya menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh dukungan dari pemerintah

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

atau elite politik semata, melainkan juga sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat sebagai sasaran kebijakan mau menerima, mempercayai, dan terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan Tribina di Desa Pamintangan masih tergolong rendah dan kurang optimal. Diketahui bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh kesibukan pekerjaan, terutama karena sebagian besar masyarakat bekerja sebagai pegawai kantoran atau memiliki aktivitas pekerjaan lain yang menyita waktu. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum memiliki kesadaran dan minat tinggi untuk mengikuti kegiatan Tribina.

4. Pembagian Potensi

a. Alokasi sumber daya untuk pelaksanaan progam

Menjelaskan bahwa suatu kebijakan atau program, sebaik apapun tujuan dan desainnya, tidak akan dapat berjalan dan mencapai sasarannya apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai untuk melaksanakannya.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan alokasi sumber daya berupa anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Tribina di Desa Pamintangan sudah optimal dan cukup mendukung keberlangsungan program. Pemerintah desa melalui APBDes berperan dalam menyediakan anggaran untuk kebutuhan operasional kegiatan, seperti konsumsi, perlengkapan kegiatan, dan insentif kader Tribina. Seluruh kader BKB, BKR, dan BKL juga mendapatkan insentif yang dibayarkan secara tepat waktu sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program.

b. Adanya distribusi kekuasaan/wewenang

Menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kekuasaan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut dibagi secara jelas, proporsional, dan sesuai dengan kapasitas masing-masing aktor yang terlibat, baik di tingkat pembuat kebijakan, pelaksana teknis di lapangan, maupun aktor pendukung lainnya. menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kekuasaan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut dibagi secara jelas, proporsional, dan sesuai dengan kapasitas masing-masing aktor yang terlibat, baik di tingkat pembuat kebijakan, pelaksana teknis di lapangan, maupun aktor pendukung lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diketahui bahwa pembagian wewenang dalam pelaksanaan progam Tribina masih kurang optimal, kegiatan Tribina telah memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab bagi setiap kader sesuai dengan bidang masing-masing. Namun, dalam pelaksanaannya pembagian tugas tersebut masih belum berjalan secara optimal.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Progam Tribina di Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dalam suatu program yang dibentuk dan dijalankan pasti ada faktor yang mempengaruhi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Seperti faktor pendorong dan faktor penghambat.

Berikut Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi implementasi progam Tribina di Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara:

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

1. Faktor Pendorong

Faktor pendorong dalam Implementasi ini mengacu pada elemen-elemen yang mendukung dan berkontribusi pada keberhasilan suatu program, faktor-faktor ini memiliki pengaruh positif dan membantu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

a. Ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan progam

Ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan suatu kegiatan. Anggaran digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan program, seperti penyediaan sarana dan prasarana, konsumsi kegiatan, transportasi, administrasi, hingga pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan adanya anggaran yang memadai, kegiatan dapat berjalan lebih terencana, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, apabila anggaran terbatas, maka pelaksanaan program dapat mengalami kendala, seperti kurangnya fasilitas pendukung, terbatasnya kegiatan, serta menurunnya partisipasi masyarakat dan pelaksana program.

. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa anggaran di Desa Pamintangan menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam pelaksanaan program Tribina. Dukungan anggaran membantu kelancaran berbagai kegiatan, seperti sosialisasi, pembinaan, pertemuan rutin, serta penyediaan sarana dan perlengkapan kegiatan. Selain itu, adanya anggaran juga mendukung pelaksanaan program agar berjalan lebih teratur, efektif, dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Tribina di Desa Pamintangan.

b. Adanya dukungan penuh dari pemerintah desa

Dukungan pemerintah desa menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam pelaksanaan program Tribina karena pemerintah desa memiliki peran penting dalam memberikan fasilitas, kebijakan, serta bantuan yang menunjang keberhasilan program. Dukungan tersebut dapat berupa penyediaan anggaran, pemberian izin kegiatan, penyediaan tempat pelaksanaan, hingga keterlibatan aparat desa dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Selain itu, pemerintah desa juga membantu melakukan koordinasi dengan kader dan masyarakat sehingga kegiatan Tribina dapat berjalan lebih terarah dan terorganisir. Dengan adanya dukungan dari pemerintah desa, pelaksanaan program Tribina menjadi lebih mudah dilaksanakan, partisipasi masyarakat meningkat, dan tujuan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai dengan lebih optimal.

. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, diketahui bahwa dukungan pemerintah desa menjadi salah satu faktor pendukung penting dalam pelaksanaan program Tribina di Desa Pamintangan. Pemerintah desa memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas, bantuan koordinasi, dukungan administrasi, serta perhatian terhadap kelancaran kegiatan Tribina. Dukungan tersebut terlihat dari keterlibatan aparat desa dalam kegiatan, penggunaan fasilitas desa sebagai tempat pelaksanaan, serta kerja sama antara pemerintah desa, kader, dan penyuluh KB dalam menjalankan program. Adanya dukungan dari pemerintah desa membuat pelaksanaan kegiatan Tribina dapat berjalan dengan lebih tertib, terorganisir, dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

c. Sarana dan prasarana yang memadai

Sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan program Tribina di Desa Pamintangan. Ketersediaan tempat kegiatan, alat pendukung, serta fasilitas lainnya membantu kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan Tribina. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, kegiatan penyuluhan, pembinaan, dan pertemuan masyarakat dapat dilaksanakan dengan lebih nyaman dan terorganisir. Selain itu, fasilitas yang tersedia juga memudahkan kader dan penyuluh KB dalam menyampaikan materi kepada masyarakat sehingga kegiatan dapat berjalan lebih efektif. Kondisi tersebut turut mendukung meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program Tribina di Desa Pamintangan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, diketahui bahwa sarana dan prasarana yang memadai menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan program Tribina di Desa Pamintangan. Ketersediaan tempat kegiatan, perlengkapan, serta fasilitas pendukung lainnya membantu kelancaran pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat. Hal tersebut terlihat dari tersedianya fasilitas yang digunakan dalam kegiatan Tribina serta pemanfaatannya yang mendukung kegiatan agar berjalan dengan tertib dan efektif. Selain itu, sarana dan prasarana yang memadai juga memudahkan kader dan penyuluh KB dalam menyampaikan materi serta membuat masyarakat lebih nyaman dalam mengikuti kegiatan. Dengan demikian, keberadaan sarana dan prasarana yang memadai turut mendukung keberhasilan pelaksanaan program Tribina di Desa Pamintangan.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam implementasi mengacu pada elemen-elemen yang menghalangi atau menghambat keberhasilan suatu program, faktor-faktor ini memiliki pengaruh negatif dan menghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

a. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembinaan keluarga

Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembinaan keluarga pada Progam Tribina menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program Tribina di Desa Pamintangan. Kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan menyebabkan pelaksanaan program tidak berjalan secara maksimal.

. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, diketahui bahwa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembinaan keluarga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program Tribina di Desa Pamintangan. Hal tersebut terlihat dari masih adanya masyarakat yang kurang aktif mengikuti kegiatan penyuluhan dan pembinaan yang dilaksanakan. Rendahnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh kesibukan masyarakat dalam bekerja serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya program Tribina. Selain itu, hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa jumlah kehadiran masyarakat dalam beberapa kegiatan masih belum sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan program Tribina belum berjalan secara maksimal sehingga diperlukan upaya dari kader, penyuluh KB, dan pemerintah desa untuk terus meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan Tribina.

b. Kualitas sumber daya manusia yang relatif kurang memadai

Kualitas sumber daya yang relatif kurang memadai menjadi salah satu faktor penghambat implementasi Program Tribina di Desa Pamintangan karena kader tidak

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

hanya bertugas menjalankan kegiatan Tribina, tetapi juga terlibat dalam berbagai kegiatan desa lainnya. Banyaknya tanggung jawab yang harus dilaksanakan membuat kader mengalami keterbatasan waktu, tenaga, dan fokus dalam menjalankan program secara maksimal. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan Tribina seperti penyuluhan, pendampingan masyarakat, koordinasi kegiatan, hingga pelaporan administrasi sering mengalami keterlambatan atau tidak berjalan secara rutin.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, diketahui bahwa kualitas sumber daya manusia yang relatif kurang memadai menjadi salah satu faktor penghambat implementasi Program Tribina di Desa Pamintangan. Dari hasil wawancara, kader menyampaikan bahwa mereka tidak hanya menjalankan kegiatan BKB, tetapi juga terlibat dalam berbagai kegiatan desa lainnya seperti posyandu, PKK, pendataan masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Banyaknya tugas yang harus dilaksanakan menyebabkan waktu dan tenaga kader terbagi sehingga pelaksanaan kegiatan BKB belum berjalan secara maksimal. Dengan demikian, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa tingginya beban kerja kader menjadi hambatan dalam mendukung implementasi Program Tribina di Desa Pamintangan

c. Kurangnya pelatihan kemampuan bagi setiap kader

Kemampuan adalah kapasitas atau kecakapan yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan suatu tugas, pekerjaan, atau aktivitas tertentu. Kemampuan dapat berupa pengetahuan, keterampilan, pengalaman, maupun sikap yang mendukung seseorang untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan efektif. Kurangnya pelatihan kemampuan kader menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi Program Tribina di Desa Pamintangan. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan belum berjalan secara optimal karena kader masih mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi maupun mengelola kegiatan program.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, diketahui bahwa kemampuan kader yang terbatas menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi Program Tribina di Desa Pamintangan. Dari hasil wawancara, kader menyampaikan bahwa kegiatan BKB selama ini lebih banyak berfokus pada monitoring perkembangan balita, seperti pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, serta penyuluhan kepada orang tua dengan materi yang masih bersifat dasar dan sesuai dengan pemahaman kader. Dengan demikian, hasil ketiga teknik pengumpulan data tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan kemampuan kader menjadi salah satu hambatan dalam optimalisasi implementasi Program Tribina di Desa Pamintangan.

d. Data belum diperbarui (updating data lemah)

Updating data atau pembaruan data merupakan proses menyesuaikan data yang tersimpan dengan kondisi terkini di lapangan, sehingga informasi yang digunakan untuk kepentingan program selalu relevan dan akurat. Lemahnya proses pembaruan data berarti belum adanya mekanisme yang berjalan secara konsisten untuk memastikan data selaras dengan perubahan kondisi riil, sehingga data yang tersedia cenderung tertinggal dari keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti di Desa Pamintangan, dapat disimpulkan bahwa data yang belum diperbarui menjadi salah satu faktor penghambat dalam Implementasi Program Tribina (BKB, BKR, dan BKL). Informan mengungkapkan bahwa pihak desa memiliki peran sentral sebagai

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

penginput data kegiatan, sehingga ketersediaan data yang kurang lengkap atau belum diperbarui mengindikasikan adanya koordinasi yang kurang baik antara pihak desa dengan kader maupun instansi pembina program. Pernyataan ini kemudian diperkuat oleh hasil observasi di lapangan, di mana peneliti mengamati bahwa dokumen data kegiatan yang tersedia belum mencerminkan kondisi terkini Kondisi ini pada akhirnya berdampak pada kualitas data yang digunakan sebagai dasar monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Implementasi Program Tribina di Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Teori Implementasi Kebiajakan menurut Donald P. Warwick adalah Kurang Optimal dalam pengimplementasiannya dengan baik, adapun penjelasannya sebagai berikut: *Pertama,* Sub-variabel kemampuan organisasi belum berjalan dengan optimal dikarenakan: (1) indikator Kemampuan Teknis Pelaksana masih kurang optimal, (2) indikator kemampuan menjalin hubungan masih kurang optimal. *Kedua*, Sub-variabel informasi sudah cukup optimal berjalan dikarenakan: (1) indikator ketersediaan data masih kurang optimal, (2) indikator penyampaian informasi sudah berjalan dengan optimal. *Ketiga*, Sub-variabel dukungan sudah cukup optimal berjalan dikarenakan: (1) indikator dukungan birokrat sudah berjalan dengan optimal, (2) indikator dukungan masyarakat masih kurang optimal. *Keempat*, Sub-variabel pembagian potensi sudah cukup optimal berjalan dikarenakan: (1) indikator alokasi sumber daya sudah berjalan dengan optimal, dan (2) indikator distribusi kekuasaan masih kurang optimal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Progam Tribina di Desa Pamintangan Kecamatan Amuntau Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara terbagi dua, yaitu: faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorongnya ialah ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana yang memadai, dan dukungan dari pemerintah desa. Sedangkan faktor penghambatnya ialah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembinaan keluarga, kualitas sumber daya manusia yang relatif kurang memadai, kurangnya pelatihan kemampuan kader, dan data belum diperbarui (updating data yang lemah).

Saran pada penelitian ini ditujukan kepada; (1) Kepala Desa Pamintangan untuk lebih mempertegas terkait struktur kerja yang lebih jelas antar pelaksana agar tidak terjadi tumpang tindih maupun ketidakjelasan peran dalam menjalankan progam. Selain itu, pembaruan data perlu dilakukan dan selalu di perbarui secara berkala sekali setahun agar dapat membantu dalam perencanaan dan evaluasi program Tribina. (2) Kepada Seluruh Kader Tribina mulai dari Kader BKB (Bina Keluarga Balita), Kader BKR (Bina Keluarga Remaja), dan Kader BKL (Bina Keluarga Lansia) untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama antar kelompok agar kegiatan dapat berjalan lebih terarah dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Kemudian kader juga perlu meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam pelaksanaan program melalui pelatihan atau pembinaan secara berkala. Kader diharapkan mampu melakukan pendekatan yang lebih komunikatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, tidak hanya melalui pertemuan formal, tetapi juga melalui pendekatan langsung ke warga, tokoh masyarakat, dan kelompok-kelompok kecil di lingkungan RT/RW serta meminta bantuan setiap RT. (3) Kepada Penyuluh Kb (Keluarga Berencana) Desa Pamintangan untuk memperkuat strategi komunikasi dan sosialisasi program kepada masyarakat dengan menggunakan pendekatan yang lebih sederhana, persuasif, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat desa. Kemudian diharapkan kepada Penyuluh KB dapat mendorong peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan dan pembinaan kader

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

secara langsung. (4) Kepada Masyarakat Desa Pamintangan untuk diharapkan dapat lebih meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam setiap kegiatan Program Tribina (BKB, BKL, dan BKR) yang diselenggarakan di desa. Kemudian, Masyarakat juga diharapkan dapat membangun rasa memiliki terhadap program desa dengan tidak hanya menjadi peserta pasif, tetapi juga ikut berperan dalam memberikan masukan, dukungan, serta membantu menyebarluaskan informasi kepada warga lainnya

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. *Pemerinth Republik Indonesia*, 1–106.

Anonim. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. *Pemerinth Republik Indonesia*, 1–106.

Anonim. (2024). *Buku Profil Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara 2024*

Anonim. (2017). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Pemerintah Republik Indonesia*, 1–18.

Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif.* Makasar: CV. Syakir Media Press

Dr. A. Hasdiansyah, S.Pd., M. . (2023). Buku Ajar Pemberdayaan Masyarakat. In *CV. Eureka Media Aksara*.

Handayani, P. (2023). Partisipasi dan Identifikasi Pembelajaran Masyarakat dan Orang Dewasa.

Hardani, et al. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.*CV. Pustaka Ilmu

Husnatul Hidayah, (2024). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa mundar kecamatan lampihong kabupaten balangan.*Jurnal MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia*, *1*, 101–107.

Leo Agustino, P. D. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi KE-2*. ALFABETA, cv.

Munawarah. (2025). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Tribina Bina Keluarga Balita , Bina Keluarga Remaja , Bina Keluarga Lansia di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Darussalam , Desa Palukahan Dan Desa Pandamaan). *Journal of Development Administrations Thinking Understand : Publik and Business Administration*, *1*, 80–86.

Safitri, D. (2025). Implementasi Progam Tribina, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) di Desa Panggandingan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Jurnal Kebijakan Publik*, *2*, 598–611.

Soetari, E. (2014). Kebijakan Publik. In *Pustaka Setia Bandung*.

Sugiyono, P. D. (2025). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitratif, dan R&D*. ALFABETA, cv.

Syahruddin. 2019. *Implementasi Kebijakan Publik.* Bandung: Nusa Media

Tim Penyusun. 2023. *Lansia Tangguh dengan Tujuh Dimensi.* Jakarta: BKKBN.